



## 75 Warga Miskin Gagal Terima Bantuan BSPS

★ 665 Lainnya Lolos Verifikasi Bantuan Rp 9,17 Miliar ✓

AMLAPURA, NusaBali

Sebanyak 75 warga miskin di Kecamatan Karangasem, gagal menerima bantuan dana BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) tahun 2015, dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dari usulan 740 warga miskin, hanya 665 rumah miskin lolos verifikasi, selebihnya tidak layak dapat bantuan, sesuai kriteria.

Kepala Seksi Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, Bambang Resti Irawan didampingi Kepala Bappeda I Ketut Sedana Merta memaparkan hal itu di sela-sela membagikan bantuan kepada warga miskin di Kantor Bappeda, Sabtu (17/10).

Bambang memaparkan bantuan stimulan tersebut, tujuannya untuk meningkatkan kualitas bangunan milik warga miskin, secara umum penilaiannya ada tiga, disebut program aladin (atap lantai dinding). Dari tiga kategori itulah diverifikasi di lapangan.

Rumah tergolong rusak se-

dang jika atap dan dindingnya yang rusak, sehingga berhak dapat bantuan Rp 10 juta. Jika, atap, lantai dan dinding yang rusak sebagian Rp 15 juta. Jika rusak ketiga-tiganya itu, dan tidak layak huni, bantuannya Rp 20 juta, bagi warga tidak memiliki rumah, per membangun baru, bantuan pusat Rp 30 juta.

"Makanya sebelum kami serahkan bantuan, tim melakukan survei, biar tepat sasaran, sambil menyosialisasikan syarat penerima bantuan," kata Bambang.

Bantuan nantinya diterima warga katanya berupa bahan bangunan. Selanjutnya warga mengerjakan secara swakelola. Sedana Merta memaparkan bantuan material, berupa atap seng atau asbes, semen dan batako. Sehingga, yang sebelumnya berlantai tanah, jadi rabat beton, dining sebelumnya gedeg berganti batako.

"Usulannya ke pusat per kecamatan. Tahun depan kami mengusulkan 1.480 warga miskin dari Kecamatan Abang, ditambah 233 warga dari Kecamatan Karan-

gasem total usulan 1.713," katanya.

Para warga miskin penerima bantuan ini sendiri, mengaku merasa bersyukur atas realisasi bantuan perbaikan rumah itu. Bahkan, Wayan Sayung dari Lingkungan Jasri Kaler, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem mengaku rumahnya beratap daun kelapa telah hancur. I Wayan Minggir dari Lingkungan Jasri Kaler, mengaku rumahnya telah rusak berat. "Kalau hujan, tidak bisa ditempati, bocor di beberapa bagian," ujar Minggir.

Warga I Wayan Merta dari Lingkungan Temega Gede, Kelurahan Padangkerta Kecamatan Karangasem juga menuturkan demikian. "Paling tidak rumah saya nanti layak ditempati," jelas Merta.

Tahun 2014, justru bantuan dari Kementerian Perumahan Rakyat sebanyak 1.233 perbaikan rumah, banyak salah sasaran. Ada staf Kantor Desa, mantan caleg, untuk ayah dan anaknya kebagian bantuan. Itulah sebabnya untuk tahun ini pengalokasian diperketat, sesuai hasil verifikasi di lapangan.

Tim yang memverifikasi melibatkan Kepala Bappeda, Kadis PU, Dinas Sosial, perbekel, lurah, dan yang terkait lainnya. Terungkap sebanyak 75 warga miskin gagal dapat bantuan yakni: Desa Seraya Timur 20, Desa Bukit 10, Desa Bugbug 2, Desa Tegallinggah 10, Kelurahan Karangasem 17, Desa Tumbu 2, Desa Pertima 6, Kelurahan Padangkerta 3, dan Desa Seraya Barat 5.

Sedangkan 665 warga kebagian bantuan tersebar di 10 desa/kecamatan: Seraya Timur 126, Bukit 55, Bugbug 85, Tegallinggah 33, Karangasem 85, Tumbu 18, Pertima 38, Padangkerta 35, Subagan 43 dan Seraya Barat 147. **k16**



PETUGAS tengah realisasikan BSPS untuk warga miskin di Kantor Bappeda, Sabtu (17/10).

• NUSABALI/MANTRA

Edisi : Senin, 19 October 2015

Hal : 2



## KPK Tingkatkan Kapasitas Apgakum di Bali

DENPASAR, NusaBali

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui program koordinasi supervisi bidang penindakan terus berupaya mendorong percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satunya dengan meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum (Apgakum) dan sinergi di antara lembaga penegak hukum. KPK meyakini salah satu kunci keberhasilan pemberantasan tindak pidana korupsi adalah upaya yang luar biasa dari Apgakum yang menjunjung tinggi nilai-nilai profesional, integritas, pengawasan efektif dan penerapan sanksi tegas untuk menimbulkan efek jera (deterrent effect).

Meningkatkan kapasitas dan sinergi itu, KPK menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Bersama Aparat Penegak Hukum 2015 yang akan berlangsung pada Senin-Jumat (19-23/10) di Sanur Paradise Plaza Hotel Denpasar. Kegiatan ini diikuti oleh 180 peserta dari beberapa institusi yakni penyidik Polda, penyidik dan jaksa penuntut kejaksaan tinggi, auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di wilayah Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Menurut Ketua Sementara KPK Taufiequrachman Ruki, kegiatan ini dilakukan untuk mengatasi berbagai kendala dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan pengembalian kerugian keuangan negara, khususnya pada provinsi Bali dan NTB. Dari sinergi ini diharapkan dapat terwujud kerja sama yang lebih efektif di antara instansi penegak hukum dengan auditor BPK dan BPKP dalam pemberantasan korupsi. "Karenanya, sinergi dan kerja sama ini mutlak dilaksanakan,

mengingat banyak kalangan yang menyatakan pemberantasan korupsi belum berjalan maksimal. Itu terjadi karena belum optimalnya upaya penegak hukum untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang telah dijarah para koruptor," papar Ruki melalui siaran pers, Minggu (18/10).

Kegiatan ini, merupakan realisasi dari fungsi mekanisme pemicu (Trigger Mechanism) yang dimiliki KPK guna mempercepat proses penanganan perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani aparat penegak hukum lainnya yakni Kepolisian dan Kejaksaan. Karena itu, pelatihan ini menjadi amat penting untuk meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan perkara, sejak di tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga penyelamatan aset negara hasil tindak pidana korupsi.

Dalam kegiatan pelatihan bersama yang diselenggarakan lima hari ini, para peserta akan dibekali 13 materi dari para narasumber yang kompeten dengan format ceramah, diskusi dan tanya-jawab. Ini bertujuan untuk memperdalam pengetahuan teknis terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi. Usai acara pembukaan, kegiatan pelatihan akan diisi dengan kuliah umum oleh sejumlah pemimpin lembaga tinggi negara antara lain Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) R Widyo Pramono, Kabareskrim Mabes Polri Anang Iskandar, Kepala BPKP Ardan Adiperdana, Anggota III BPK Eddy Mulyadi Soepardi, Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Agus Santoso, dan Ketua Sementara KPK Taufiequrachman Ruki.

Edisi : 19 Oktober 2015

Hal : 14



# Pemasukan PDAM ke Pemkab Relatif Kecil

Untuk perbaikan infrastruktur, Pemkab Badung menggelontor anggaran sebesar Rp 55 miliar. Sedangkan 'setoran' PDAM ke pemkab pada 2014, sebesar Rp 13 miliar.

MANGUPURA, NusaBali

Anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk 'menghidupi' Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Mangutama, tidak bisa dibilang sedikit. Megaprojek perbaikan infrastruktur air bersih di kawasan Kuta Selatan (Kutsel) senilai Rp 55 miliar lebih yang dikerjakan multiyears sejak 2014 hingga 2015, adalah satu dari program pemerintah menyuntikkan dana besar kepada perusahaan ini. Meski demikian, perusahaan hanya mem-

berikan pemasukan yang nilainya tak sebanding dengan investasi yang dikeluarkan.

Setoran PDAM ke kas daerah tahun 2014 berdasarkan data yang dihimpun, Minggu (18/10), sebesar Rp 13 miliar. Setoran tersebut bila dibandingkan dengan tahun 2010 jauh lebih besar. Pada 2010, setoran PDAM hanya Rp 5 miliar. Karena itu pihak direksi PDAM mengklaim setoran ini telah naik signifikan dari tahun-tahun sebelumnya.

Direktur Utama PDAM Tirta Man-

gutama I Made Subargayasa, hanya menjawab enteng saat dimintai penjelasan perihal setoran ke kas daerah. Pihaknya sama sekali tak menampik hal tersebut, namun apa yang sudah diberikan perusahaan lebih baik ketimbang yang sudah-sudah.

"Sekarang ini kami sudah bisa memberikan pemasukan ke kas daerah sebesar Rp 13 miliar. Coba lima tahun lalu, itu cuma Rp 5 miliar," kilahnya.

Subargayasa mengakui pemasukan ke kas daerah ini relatif ke-

cil dibandingkan dengan investasi pemerintah yang mencapai puluhan miliar rupiah. Tetapi, sebagai perusahaan yang berhubungan dengan pelayanan dan pemenuhan hajat hidup orang banyak, tidak semata-mata profit jadi ukuran. Ia mengatakan harus dilihat juga fungsi sosialnya. "Kami juga mengemban misi sosial, jadi tidak semata-mata berorientasi komersial," jelasnya.

Meski begitu, pihaknya berjanji akan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dan bersamaan

dengan itu akan berupaya memberikan kontribusi juga kepada kas daerah. Saat ini, katanya, ada sekitar 2.000 pelanggan yang masuk daftar tunggu. Sehingga dengan semakin banyaknya pelanggan, maka diharapkan dapat lebih meningkatkan pendapatan.

Hal serupa juga disampaikan Kabag Humas dan Protokol Pemkab Badung AA Gede Raka Yuda. "PDAM itu tidak hanya melihat untung, tapi mengedepankan misi sosial," tandasnya. **as**

Edisi : Edisi 19 Oktober 2015

Hal : 2